

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pengolahan dan analisis data mengenai “Pengawasan DPRD Dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kabupaten Bandung)”, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu dengan 2 cara yaitu: 1) Langsung, dengan cara ini yaitu DPRD turun langsung ke lapangan sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui masukan-masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat; 2) Tidak langsung, dengan cara tidak langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan. DPRD mendapat masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan pihak sekolah. Untuk tingkat efektifitas dan inisiatif DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini sudah dirasakan optimal, hanya dari pemerintah daerah dan dinas yang terkait belum maksimal dalam menjalankan Perda penyelenggaraan pendidikan. DPRD mengetahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan telah optimal dari forum dialog

antara dinas pendidikan, dan masyarakat Kabupaten Bandung, serta membaca berita dari koran-koran lokal.

2. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu: 1) Keterbatasan waktu, hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Bandung salah satunya berhubungan dengan irisan waktu dimana DPRD Kabupaten Bandung tidak hanya mengawasi Perda penyelenggaraan pendidikan saja tetapi banyak Perda lain yang harus dibahas dan diawasi; 2) Keterbatasan anggaran, permasalahan yang kedua tidak bisa di pungkiri karena begitu luasnya wilayah Kabupaten Bandung sehingga memerlukan biaya dalam melakukan pengawasan. Selain permasalahan dari DPRD, permasalahan juga datang dari pemerintah daerah yang belum maksimal didalam kesiapan sarana dan prasarana yang kurang menunjang, misalnya fasilitas sekolah yang mesti disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di era sekarang, selain itu budaya masyarakat yang belum terbina dengan baik dan kurang begitu memahami makna tentang pentingnya pendidikan yaitu dengan beranggapan bahwa bersekolah hanya menghambur-hamburkan uang saja karna mereka melihat realita yang ada bahwa pendidikan itu sangat mahal.
3. Solusi DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pendidikan ini yaitu dengan cara: 1) Dialog/sharing, dengan cara ini DPRD tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan dengan mengajak sharing pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang dalam hal ini

dinas pendidikan dan masyarakat Kabupaten Bandung; 2) Sebagai mediator ketika terjadi sengketa antara dinas dan masyarakat. Selain dengan cara-cara tadi DPRD juga melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan Perda penyelenggaraan pendidikan, baik itu dengan pihak sekolah dan masyarakat yang belum merasakan dampak positif dalam implementasi Perda penyelenggaraan pendidikan untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan DPRD mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik itu yang merasa belum mendapat manfaat dari implementasi Perda penyelenggaraan pendidikan dan bila dianggap perlu DPRD dapat meninjau kembali peraturan daerah (Perda) yang sudah diberlakukan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

### **1. Saran Untuk DPRD Kabupaten Bandung**

- a. Aspirasi atau masukan-masukan dari masyarakat agar ditampung dan secepatnya di carikan solusi bila aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berupa masalah atau keluhan tentang Perda penyelenggaraan pendidikan jika aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat berupa saran untuk perbaikan Kabupaten Bandung sesegera mungkin dibicarakan dengan pemerintah Kabupaten Bandung sehingga apa yang menjadi permasalahan

akan terpecahkan.

- b. Bila pemerintah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan kurang serius maka DPRD sebaiknya bertindak tegas dengan menggunakan mekanisme yang bisa dijalankan oleh DPRD Kabupaten Bandung yaitu menggunakan hak yang DPRD miliki yaitu hak interpelasi dan hak angket agar pemerintah Kabupaten Bandung lebih serius lagi dalam menjalankan Perda penyelenggaraan pendidikan ini.

## **2. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Bandung**

- a. Pemerintah Kabupaten Bandung agar segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, seperti bangunan-bangunan fisik (Gedung sekolah) yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jaman.
- b. Pemerintah Kabupaten Bandung jangan memberikan kesempatan kepada para oknum untuk menyalah gunakan kewenangannya terhadap Perda penyelenggaraan pendidikan, agar pendidikan di Kabupaten Bandung dapat berjalan dengan optimal yang sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Bandung untuk memajukan daerah dengan mengembangkan pendidikan, karna tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendidikan itu sangat penting.
- c. Dinas pendidikan Kabupaten Bandung dalam menjalankan perannya dalam dunia pendidikan diharapkan terus menjalankan sistem yang telah ada dan

terus berusaha mencari solusi (jalan) untuk bisa mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bandung dengan melakukan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

### **3. Saran Untuk Masyarakat Kabupaten Bandung**

- a. Masyarakat sebaiknya mematuhi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena bila masyarakat tidak mematuhi Perda penyelenggaraan pendidikan tersebut berarti masyarakat tidak mendukung terlaksananya pendidikan di Kabupaten Bandung untuk bisa mengembangkan pendidikan sesuai dengan keadaan jaman.
- b. Masyarakat harus ikut terus untuk berpartisipasi didalam mengembangkan pendidikan karna dengan hal itu masyarakat berarti ikut mensukseskan Kabupaten Bandung di dalam dunia pendidikan.
- c. Masyarakat agar menegur bila ada penyelewengan-penyelewengan mengenai masalah pendidikan yang dilakukan oleh oknum-oknum dikalangan pendidikan. Dan bila masyarakat melihat ada anak sekolah yang berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada waktu jam sekolah masyarakat untuk tidak segan-segan menegur mereka, karena dengan sikap pro aktif dari masyarakat dapat membantu terciptanya pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.